

May Day 2024

Wujudkan Kesejahteraan & Kedaulatan Rakyat



Aksi Peringatan May Day 2024

Wujudkan Kesejahteraan dan Kedaulatan Rakyat

Penyusun:

Aliansi BARA API X Coklektif

Editor&Tata Letak

Senjamelawan

Cover

Senjamelawan

E-booklet ini diterbitkan oleh

Aliansi BARA API

Mei 2024



Terbitan ini bersifat publik, artinya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang, baik dicetak ulang, disebarluaskan, atau digunakan sebagai bahan kampanye, advokasi, belajar atau penelitian. Tetapi tetap cantumkan kami ya. Hidup Buruh & Hidup Rakyat

Pengantar

Ketika May Day tiba di seluruh dunia, May Day membawa serta warisan ketahanan, solidaritas, dan semangat gigih para pekerja di mana pun. Berasal dari perjuangan bersejarah gerakan buruh di akhir abad ke-19, hari ini merupakan bukti upaya tak kenal lelah dan pengorbanan para pekerja yang telah memperjuangkan hak, martabat, dan terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan setara. Di luar makna simbolisnya, May Day juga berfungsi sebagai pengingat kuat akan jalinan aspirasi kemakmuran dan kedaulatan yang menjadi inti gerakan buruh.

May Day berakar dari perjuangan untuk delapan jam kerja sehari—perjuangan yang dilakukan oleh para pekerja yang berani memimpikan sebuah dunia di mana pekerja tidak identik dengan eksploitasi dan kelelahan. Dari peristiwa Haymarket di Chicago hingga jalanan kota-kota di seluruh dunia, para pekerja bersatu dalam solidaritas, menuntut upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan pengakuan atas hak-hak dasar mereka. Meskipun perjalanan ini penuh dengan kesulitan dan pengorbanan, upaya kolektif mereka membuka jalan bagi perubahan transformatif dan menginspirasi generasi mendatang. Pada intinya, May Day mewujudkan visi kemakmuran bagi semua—sebuah visi di mana setiap pekerja diberi kesempatan untuk berkembang, berkembang, dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini tidak hanya mencakup kompensasi yang adil dan pekerjaan yang layak tetapi juga akses terhadap perlindungan sosial yang penting, layanan kesehatan, pendidikan, dan suara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Terlebih lagi, kemakmuran sejati melampaui sekedar kekayaan materi, yang mencakup gagasan tentang pemenuhan, kesejahteraan, dan realisasi potensi penuh seseorang sebagai manusia.

Yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mencapai kemakmuran adalah gagasan kedaulatan—hak yang melekat pada masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri dan menentukan nasib kolektif mereka. May Day berfungsi sebagai pengingat tentang kedaulatan buruh, yang melalui aksi terorganisir dan suara kolektif mereka, menegaskan hak pilihan mereka dan bersama-sama memperjuangkan demokrasi. Hal ini tidak hanya mencakup kedaulatan politik tetapi juga kedaulatan ekonomi, di mana pekerja mempunyai kendali atas hasil kerja mereka dan berpartisipasi dalam membentuk struktur ekonomi yang mengatur kehidupan mereka. Saat kita memperingati May Day di abad ke-21, kita dihadapkan pada tantangan dan peluang baru yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif kita. Mulai dari maraknya otomatisasi dan pekerjaan tidak tetap hingga kebutuhan mendesak akan perubahan iklim dan kesenjangan global, perjuangan untuk hak-hak dan martabat pekerja terus berlanjut. Namun, di tengah tantangan-tantangan ini, masih ada harapan – sebuah pengakuan bahwa semangat solidaritas dan ketahanan yang menjiwai May Day masih bertahan, menginspirasi generasi baru untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kemajuan umat manusia.

May Day lebih dari sekedar peringatan – ini adalah seruan untuk bertindak, penegasan kembali komitmen kita untuk membangun dunia di mana kemakmuran dan kedaulatan bukan hanya sekedar aspirasi tetapi kenyataan yang dijalani bagi semua orang. Saat kita berkumpul untuk merayakan kemenangan masa lalu dan merencanakan masa depan, mari kita nyalakan kembali api solidaritas, memperkuat suara kelompok yang terpinggirkan, dan mendedikasikan kembali diri kita pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia yang tak lekang oleh waktu. Dengan melakukan hal ini, kami menghormati warisan May Day dan membuka jalan menuju dunia yang lebih cerah, inklusif, dan adil bagi generasi mendatang.

Bagian 1: Kondisi Pekerja Terkini

Tentang Kondisi Buruh Nasional dan Jawa Timur: Jalan Terjal Ketenagakerjaan Pasca Pandemi

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2022 telah menyebabkan krisis yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Runtuhnya kekuatan ekonomi berdampak langsung pada sektor ketenagakerjaan, tahun 2021-2022 menjadi momen pahit dimana banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan dalih efisiensi tenaga kerja, pengurangan jam kerja, WFH, maupun pemberhentian operasi sementara. Kondisi tersebut diperparah dengan penerbitan UU Cipta kerja yang membuat perusahaan semakin semena-mena dalam melakukan PHK.

Kondisi tersebut telah menyebabkan lonjakan Tingkat pengangguran, dari yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 4,94% menjadi 7,07% pada tahun 2021¹. Pada 2024 atau 2 tahun pasca pandemi covid-19, sektor ketenagakerjaan di Indonesia bisa dibilang masih belum stabil, hal ini bisa dilihat dari tingkat pengangguran nasional yang masih berada pada angka 5,7%². Di Jawa Timur sendiri tingkat pengangguran berada pada angka 4,8% per 2023, dimana kota Surabaya menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi, sebesar 6,76%. Kenapa prosentase tingkat pengangguran tidak bisa kembali seperti ketika sebelum pandemi.

Indonesian for Global Justice dalam tulisannya menjelaskan bahwa, kondisi tersebut disebabkan karena terjadinya informalisasi pekerjaan³, dimana banyak korban PHK yang sebelumnya bekerja di sektor formal/industri kini berada pada sektor informal, seperti menjadi driver Go-Jek, Maxim, Grab, menjadi Kurir pengantaran, ada pula yang akhirnya memilih untuk menjual makanan/minuman. Selain itu para pekerja yang masih bertahan mengalami penurunan tingkat upah, hal tersebut terjadi dikarenakan para pekerja terpaksa harus menerima pemotongan upah dari perusahaan dengan dalih penurunan pemasukan akibat pandemi.

Pendapatan yang lebih kecil dibanding sektor formal/industri plus tidak adanya jimanan ketenagakerjaan pada sektor informal membuat kondisi pekerja menjadi semakin terhimpit. Minmnya pilihan yang bisa diambil menyebabkan banyak para pekerja akhirnya mau tidak mau memilih menjadi pekerja informal kendati jalan tersebut terjal dan berliku-liku.

Pekerja Anak dan Anak Pekerja: Antara Kerentanan dan Kemiskinan

Isu mengenai pekerja anak selalu menjadi topik penting ketika berbicara mengenai isu perburuhan, posisinya yang rentan mengalami kekerasan, manipulasi, eksploitasi, dan upah rendah telah membuat isu pekerja anak menjadi masalah serius yang harus diselesaikan. Namun pertanyaannya, kendati telah mendapat perhatian khusus oleh para akademisi, Lembaga non-pemerintah maupun lembaga pemerintah dalam tingkat nasional dan internasional, mengapa masalah pekerja anak tidak pernah terselesaikan?

¹ Review Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020-2024, Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2021.

² [BPS Provinsi Jawa Timur](#)

³ [Buruh indonesia dalam kepungan Krisis - Indonesia for Global Justice \(igj.or.id\)](#). diakses pada 15:37

Pada tahun 2014 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan laporan berjudul "*Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*". Laporan ini memuat tentang situasi pekerja anak di Indonesia dan upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022. Namun data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tentang "Pekerja Anak Di Indonesia 2022" menunjukkan bahwa hingga tahun 2021 masih ada 1,05 juta pekerja anak (10-17 tahun) di Indonesia, walaupun menunjukkan tren penurunan dibanding tahun 2017 dengan jumlah 1,27 juta yang tidak bisa dielakkan adalah tren penurunan ini terbilang sangat kecil, dalam kurun 4 tahun penurunan hanya berkisar pada angka 0,24%, artinya strategi pemerintah kurang signifikan dan tidak menyentuh akar masalah.

Apabila berbicara mengenai penyebab utama masih banyaknya pekerja anak di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari faktor kemiskinan. Anak yang tinggal dalam keluarga buruh yang pendapatannya kecil berpotensi besar menjadi pekerja anak, begitupun sebaliknya, anak dalam keluarga kaya, lebih kecil potensinya. Ditambah lagi minimnya jaminan sosial yang diberikan untuk anak buruh berpendapatan kecil, membuat pilihan menjadi lebih sulit.

Jika dilihat dari akar masalahnya, cara efektif untuk menghapuskan pekerja anak di Indonesia adalah dengan menerapkan upah layak bagi buruh sesuai dengan kebutuhan istri dan anak, juga menuntut perusahaan memberikan jaminan sosial bagi anak buruh, sekurang-kurangnya dengan memberikan jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan.

Jebakan Kemitraan: Pengabaian Hak Pekerja Pada Sektor *Online*

Kemunculan moda transportasi berbasis platform seperti Go-Jek, Grab, In-Drive, Maxim, Shopee telah menandai perkembangan ekonomi platform di Indonesia. Menurut pengertiannya sendiri ekonomi platform adalah model bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk menghubungkan produsen/penyedia jasa dengan konsumen. Kemunculannya turut pula menandai pergeseran hubungan kerja. Hubungan kerja tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang tradisional, seperti antara pemilik pabrik sebagai majikan dengan buruh yang bekerja dan mendapat upah.

Go-Jek misalnya, para penyedia jasa/driver tidak mendapat upah langsung dari perusahaan, tetapi dianggap sebagai mitra kerja yang menggunakan aplikasi Go-Jek untuk mendapat konsumen. Pesatnya perkembangan perusahaan transportasi berbasis platform tidak terlepas dari keberhasilan mereka dalam menarik banyak sekali orang untuk bergabung menjadi mitra kerja. Dilansir dari theconversation.com sesuai data dari asosiasi ojol jumlah driver yang menggunakan aplikasi telah mencapai 4 juta jiwa⁴.

Tawaran akan fleksibilitas kerja dimana para mitra bisa dengan bebas menentukan berapa besar pendapatan dan berapa lama jam kerja seseuai dengan kemampuan mereka menjadi faktor utama yang menarik banyak orang berbondong-bondong mendaftar di perusahaan transportasi berbasis platform. Tapi benarkah menjadi pekerja mitra lebih bebas dan menguntungkan?

Dalam buku yang diterbitkan oleh Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) berjudul "*Kemitraan Semu Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*" menemukan fakta bahwa penghasilan driver ojol jauh lebih kecil dibandingkan upah minimum per jam nasional. Sesuai data yang diambil pada April

⁴ [Cek Fakta: tepatkah meregulasi ojek 'online' sebagai bagian transportasi umum? \(theconversation.com\)](http://cek.fakta.tepatkah.meregulasi.ojek.online.sebagai.bagian.transportasi.umum.theconversation.com), diakses pada 03:37

2020 penghasilan driver ojol Grab, Go-Jek dan Maxim hanya sebesar 8.011 Rp/jam untuk roda empat dan 5.712 Rp/jam untuk roda dua⁵.

Besaran tarif dasar, skema insentif, dan ketentuan lain yang mengatur, semua diputuskan secara sepihak oleh perusahaan penyedia platform tanpa mengajak mitra driver, hubungan yang tidak setara ini menyulitkan mereka untuk menuntut perusahaan penyedia platform, padahal apabila menengok UU No, 8 Tahun 2008, hubungan kemitraan menekankan pada hubungan yang setara antara kedua belah pihak. Ditambah lagi status driver sebagai mitra membuat semua beban kerja dan risiko kerja ditanggung oleh pekerja mitra.

Tawaran akan fleksibilitas dan pendapatan yang memuaskan sebagai pekerja mitra hanya omong kosong perusahaan penyedia platform untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Faktanya pekerja mitra justru lebih rentan dieksploitasi, tidak salah apabila mengatakan bahwa status pekerja mitra adalah bentuk degradasi hubungan kerja.

Dampak dan Ancaman Komersialisasi Pendidikan

Pendidikan, yang pernah dipuji sebagai mercusuar pencerahan dan jalan menuju mobilitas sosial, kini semakin terjerumus ke dalam cengkeraman komersialisasi. Ketika lembaga-lembaga di seluruh dunia menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menghasilkan pendapatan, misi suci pendidikan berisiko dibayangi oleh motif keuntungan.

Komersialisasi sering kali memberikan insentif kepada institusi untuk memprioritaskan keuntungan finansial dibandingkan integritas akademis. Dengan menjamurnya perusahaan-perusahaan pendidikan yang mencari keuntungan, terdapat kekhawatiran yang semakin besar bahwa standar akademis dapat dikompromikan demi kepentingan margin keuntungan. Terkikisnya integritas akademis ini melemahkan kredibilitas dan efektivitas lembaga pendidikan.

Komodifikasi pendidikan memperburuk kesenjangan sosio-ekonomi yang ada dengan menciptakan hambatan akses bagi komunitas marjinal. Ketika biaya sekolah meroket dan sumber daya pendidikan semakin diprivatisasi, siswa dari keluarga kelompok berpenghasilan rendah menghadapi tantangan yang tidak proporsional dalam mengakses pendidikan berkualitas. Hal ini melanggengkan siklus kemiskinan dan memperkuat stratifikasi sosial.

Ketika pendidikan menjadi sebuah komoditas, penekanannya beralih dari pembelajaran holistik ke kredensial yang dapat dipasarkan. Nilai-nilai inti pendidikan seperti pemikiran kritis, kreativitas, dan keterlibatan masyarakat tidak lagi penting dalam mengejar keterampilan kejuruan yang dianggap menguntungkan di pasar kerja. Fokus sempit pada hasil-hasil yang bermanfaat melemahkan esensi pendidikan sebagai kekuatan transformatif dan memberdayakan.

Kepentingan komersial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pendidikan dan proses pengambilan keputusan, sehingga melanggar kebebasan akademik. Lembaga-lembaga yang terikat pada sponsor perusahaan atau agenda yang berorientasi pada keuntungan mungkin menghadapi tekanan untuk menyensor suara-suara yang berbeda pendapat atau menyesuaikan

⁵ Hernawan, Ari, Dessi, Anindiya, dkk. “Kemitraan Semu Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia: Analisis Terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra”. (FISIPOL UGM, 2024) IGPA Press. Hal, 7-8

kurikulum agar selaras dengan kepentingan komersial. Erosi otonomi akademis ini menghambat keberagaman intelektual dan inovasi.

Komodifikasi pendidikan sering kali mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas, sehingga menyebabkan menjamurnya layanan pendidikan di bawah standar. Dalam pasar yang kompetitif, institusi mungkin mengambil langkah-langkah pemotongan biaya dan ekspansi yang cepat untuk memaksimalkan keuntungan. Akibatnya, dunia pendidikan dibanjiri dengan pabrik diploma, sehingga menimbulkan ancaman terhadap standar pendidikan.

Komersialisasi pendidikan menimbulkan ancaman besar terhadap prinsip-prinsip dasar pembelajaran dan penyelidikan intelektual. Saat kita menghadapi situasi yang berbahaya ini, sangat penting untuk menjaga integritas, aksesibilitas, dan otonomi pendidikan dari gangguan kepentingan yang berorientasi pada keuntungan. Hanya dengan memprioritaskan kesejahteraan kolektif peserta didik dan memupuk budaya keunggulan pendidikan, kita dapat memitigasi dampak buruk komersialisasi dan menjunjung tinggi nilai pendidikan sebagai barang publik.

Bagian 2: Krisis Sosial Ekologis Mengancam Pekerja

Hubungan yang Tidak Dapat Dihindari: Bagaimana Perubahan Iklim Berdampak pada Pekerja Saat Ini

Di tengah rumitnya tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, ada satu hal yang sering diabaikan adalah dampaknya yang besar terhadap para pekerja. Mulai dari petani hingga pekerja pabrik, pekerja kantor hingga pekerja di luar ruangan, dampak perubahan iklim berdampak pada setiap sektor pekerjaan, mengubah mata pencaharian dan mendefinisikan kembali sifat pekerjaan itu sendiri. Ketika komunitas global bergulat dengan meningkatnya krisis iklim, penting untuk menyadari adanya hubungan rumit antara degradasi lingkungan dan kehidupan pekerja.

Bagi mereka yang melakukan pekerjaan yang menuntut fisik, perubahan iklim menimbulkan ancaman langsung dan nyata terhadap kesehatan dan keselamatan. Pekerja di luar ruangan, seperti pekerja konstruksi, pekerja pertanian, dan kru pemeliharaan utilitas, menghadapi peningkatan risiko penyakit yang berhubungan dengan panas karena suhu melonjak hingga mencapai rekor tertinggi. Selain itu, kejadian cuaca ekstrem, yang diperburuk oleh perubahan iklim, menempatkan para pekerja dalam bahaya, membuat mereka rentan terhadap bahaya mulai dari banjir dan badai hingga kebakaran hutan dan tanah longsor.

Perubahan iklim tidak hanya mengganggu lingkungan fisik tetapi juga tatanan sosio-ekonomi yang menjadi sandaran penghidupan. Di wilayah yang bergantung pada industri yang rentan terhadap fluktuasi lingkungan—seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata—pekerja menanggung beban terbesar dari perubahan pola cuaca, berkurangnya sumber daya, dan terganggunya rantai pasokan. Petani skala kecil, misalnya, menghadapi curah hujan yang tidak dapat diprediksi, kegagalan panen, dan hama yang menyerang, sehingga membahayakan stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan mereka.

Mungkin yang paling berbahaya adalah perubahan iklim memperburuk kesenjangan yang ada dalam pekerja. Kelompok masyarakat yang rentan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok marjinal, dan masyarakat adat, menanggung beban degradasi lingkungan secara tidak proporsional. Komunitas-komunitas ini seringkali kekurangan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi, sehingga membuat mereka dihadapkan pada risiko yang lebih tinggi dan peluang pemulihan yang terbatas.

Saat kita menghadapi tantangan besar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, kita harus menyadari adanya hubungan intrinsik antara kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Penderitaan para pekerja menjadi pengingat yang menyedihkan bahwa konsekuensi dari tidak adanya tindakan tidak hanya mencakup mencairnya lapisan es dan naiknya permukaan air laut—hal ini juga berdampak pada komunitas, perekonomian, dan kehidupan individu di seluruh dunia. Dengan mengakui dampak besar perubahan iklim terhadap angkatan kerja dan menerapkan visi kesejahteraan bersama, kita dapat memetakan jalan menuju masa depan yang lebih berketahanan, adil, dan berkelanjutan bagi semua orang.

Masa Depan Nutrisi Pekerja: Realitas Krisis Air dan Pangan yang Saling Terkait pada Pekerja

Dalam tantangan global yang rumit, jalinan kelangkaan air dan kerawanan pangan menjalin narasi kompleks yang sangat berdampak pada kehidupan dan penghidupan para pekerja di seluruh dunia. Mulai dari pekerja di perdesaa hingga pekerja di perkotaan, dampak dari krisis ini berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, mengubah dinamika kerja dan memberikan tantangan besar terhadap kesejahteraan manusia. Saat kita menghadapi realitas krisis air dan pangan yang semakin menyatu, menjadi semakin jelas bahwa mengatasi tantangan-tantangan yang saling berhubungan ini sangat penting untuk memastikan kesehatan, produktivitas, dan martabat pekerja di mana pun.

Kelangkaan air, yang didorong oleh berbagai faktor termasuk perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, merupakan ancaman langsung bagi pekerja di berbagai sektor. Di daerah-daerah yang bergulat dengan berkurangnya pasokan air, para pekerja menghadapi tantangan mulai dari akses yang tidak memadai terhadap air minum bersih dan fasilitas sanitasi hingga gangguan pada proses industri dan produksi pertanian. Selain itu, beban kelangkaan air secara tidak proporsional ditanggung oleh komunitas marginal dan kelompok rentan, sehingga memperburuk kesenjangan yang ada dan menghambat pembangunan ekonomi.

Pada saat yang sama, momok kerawanan pangan semakin besar dan membayangi kehidupan para pekerja dan keluarga mereka. Ketika sistem pangan global bergulat dengan dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketegangan geopolitik, para pekerja menghadapi kenyataan pahit berupa kenaikan harga pangan, panen yang tidak menentu, dan kekurangan nutrisi. Di masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, para pekerja sering kali menghadapi pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan dasar nutrisi dan memenuhi tanggung jawab pekerjaan mereka – sebuah dilema yang melemahkan produktivitas, melanggengkan kemiskinan, dan melanggengkan siklus kerentanan.

Hubungan antara kelangkaan air dan kerawanan pangan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan sebuah jaringan kompleks yang saling memberikan dampak dan umpan balik. Misalnya, kelangkaan air dapat menurunkan produktivitas pertanian, sehingga menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan dan kenaikan harga. Pada gilirannya, kerawanan pangan dapat mendorong pola migrasi ketika para pekerja mencari peluang kerja di wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap pangan dan air. Tekanan migrasi ini, pada gilirannya, membebani infrastruktur, memperburuk persaingan sumber daya, dan berkontribusi terhadap ketegangan sosial—yang semuanya berdampak pada angkatan kerja dan masyarakat luas.

Saat kita menghadapi tantangan-tantangan yang saling terkait antara kelangkaan air dan kerawanan pangan, kita perlu menyadari dampak mendalam dari krisis-krisis ini terhadap angkatan kerja dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengakui realitas krisis air dan pangan yang saling berhubungan dan menerapkan komitmen kolektif terhadap pembangunan berkelanjutan, kita dapat membuka jalan menuju tempat kerja yang berketahanan, inklusif, dan berkembang di mana setiap pekerja memiliki akses terhadap sumber daya penting yang mereka perlukan untuk berkembang. Dengan melakukan hal ini, kami tidak hanya menjaga kesejahteraan pekerja saat ini namun juga meletakkan dasar bagi masa depan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Bagian 3: Konflik Sosial Ekologis Meluas

Krisis Ruang Hidup Di Jawa Timur, Rakyat Kian Terpuruk Dalam Pusaran Konflik Agraria

Sampai hari ini, reforma agraria di Tanah Air belum terwujud. Ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan yang berkelindan di setiap daerah, meningkatkan tensi dalam konflik agraria. Sementara penanganan juga penyelesaian atas segala ketidakadilan serta konflik agraria jauh dari kata usai. Di Jawa Timur, perampasan terhadap ruang hidup belakangan turut menyisakan derita bagi rakyat sipil. Bahkan, kerap diiringi praktik kriminalisasi dan represif. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, kurang lebih ada 66 kasus konflik agraria di Jawa Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2020 - 2023). Dari jumlah tersebut, membuatnya masuk dalam daftar 5 propinsi sebagai zona sangat rentan konflik agraria di Indonesia. WALHI Jawa Timur mencatat, lokasi yang selama ini menjadi episentrum konflik agraria membentang dari Matraman, Surabaya Raya, Malang Raya, Tapal Kuda, Madura, Pesisir Selatan, Pesisir Utara dan Kepulauan.

Tipologi konflik agraria Jawa Timur pun beragam. Mulai dari sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir dan pulau-pulau kecil, infrastruktur, properti dan fasilitas militer. Hal ini selain buntut operasi perusahaan-perusahaan pemilik konsesi, sebagian lain karena geliat pembangunan infrastruktur dan kawasan industri lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kian agresif. Kegiatan tersebut secara kasat mata telah menimbulkan dampak sosial-ekologis signifikan, yakni perubahan dan kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, kerugian ekonomi, budaya, politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintahan Indonesia yang kini disetir oligarki, lewat produk hukum yang timpang, dimanfaatkan untuk mengakomodir kepentingan kelompoknya belaka. Segelintir orang yang berkuasa dengan leluasa mengotak-atik peraturan hukum, serta melancarkan aksi perampasan tanah rakyat sebagai hal yang lazim, dengan dalih pembangunan demi kesejahteraan. Padahal, sebenarnya mereka lah yang menjadi aktor dalam setiap penyerobotan lahan warga sipil, perusakan dan penghancuran alam.

Bentang konflik agraria di Jawa Timur yang semakin berkecamuk, menorehkan catatan buruk mengenai kegagalan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Negara selalu setengah hati dalam mengentaskan kasus-kasus agraria di Jawa Timur. Bertindak sebagai pemangku kebijakan dan aktor utama, negara justru menciptakan desain pengaturan tanah lewat peraturan hukum secara serampangan demi mencapai ambisi bisnisnya, semakin memperluas jurang ketimpangan. Mengakarnya sindikat mafia tanah terorganisir yang sukar diberantas. Ditambah bank tanah, jika ditelaah mendalam berpotensi besar dalam memperpanjang praktik-praktik liberalisasi tanah dan mengedepankan logika pasar. Rakyat sipil, terutama petani ialah yang paling merasakan dan menderita akibat menjadi korban dari buah ketidakadilan struktural tersebut. Petani juga selalu terperangkap di lingkaran kemiskinan struktural dan konflik agraria berkepanjangan. Dalam urusan pertanahan, negara seharusnya berpihak kepada petani dan rakyat kecil dengan menjamin sepenuhnya hak atas tanah sesuai amanat konstitusi dan UUPA demi mewujudkan reforma agraria sejati.

Kriminalisasi Pejuang Rakyat Kian Marak

Teror dan ancaman kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, pejuang HAM dan buruh kian melesat kencang, seakan tidak ada rem untuk menghentikannya. Di Jawa Timur, pelanggaran HAM menunjukkan tren yang amat buruk. Bingkai kriminalisasi teruntai dalam bentuk-bentuk pelanggaran HAM mencangkup hajat hidup rakyat sipil. Di sektor perburuhan LBH Surabaya mencatat, selama 2023 dari total 168 kasus tersebut didominasi buruh dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kasus kriminalisasi sebagai bentuk pelanggaran HAM pada akhir 2023 ialah menimpa seorang buruh perempuan, yakni Dwi. Perjuangannya ialah menuntut hak atas upah selama 3 bulan juga jaminan kesehatan ketika bekerja sebagai buruh kontrak kepada PT. Mentari Nawa Satria. Namun tidak digubris instansi terkait. Ia justru terkianati dalam proses hukum oleh negara dalam dugaan tindak pemalsuan surat rekomendasi kerja yang dilaporkan balik perusahaan tersebut, hingga berujung penahanan dirinya.

Potret kejadian tersebut tidak hanya bergulir di sektor perburuhan, melainkan juga menimpa pejuang lingkungan. Pola kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di Jawa Timur ini selalu memakai pasal-pasal yang berbeda dalam proses hukum. Berberapa kasus yang sudah-sedang bergulir, seperti kriminalisasi terhadap Budi Pego sebagai pejuang lingkungan dan warga dari Tumpang Pitu Banyuwangi. Ia dikenakan Pasal 107a UU RI No. 27/1999 berkaitan kejahatan terhadap keamanan negara tentang penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme telah divonis bersalah sampai tingkat kasasi. Beralih ke Desa Pakel Kecamatan Licin Banyuwangi, kriminalisasi turut menimpa trio petani Pakel (Mulyadi, Suwarno dan Untung) yang tengah memperjuangkan hak atas tanah dengan PT Bumi Sari. Mereka divonis bersalah dengan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.1/1946 tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan terjadi keonaran di masyarakat.

Sekelumit kejadian ini menjadi pertanda bahwa pejuang keadilan rentan sekali dengan jeratan kriminalisasi. Negara sendiri juga abai dalam memberikan perlindungan dan jaminan hukum. Salah satu peraturan hukum yang tercipta yakni UU Minerba Pasal 162 No. 3/2020 (sebelum diubah dalam UU No. 6/2023 Tentang Cipta Kerja), semakin melanggengkan praktik-praktik kriminalisasi terhadap pejuang keadilan yang mengalami imbas dari pertambangan. Segelintir orang dengan akses dan kontrol penuh atas negara, selalu memainkan instrument hukum yang timpang, melalui pasal-pasal untuk memberangus pejuang keadilan dan menjauhkan diri dari jeratan hukum. Negara harus bertanggung jawab secara penuh dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM yang seringkali menyudutkan pejuang lingkungan, pejuang HAM, serta buruh selama proses hukum. Negara juga tidak boleh abai dalam setiap kasus kriminalisasi dan perampasan ruang hidup yang merugikan rakyat sipil.

Penutup

Narasi-narasi singkat di atas merupakan sebuah fakta yang nyata terpampang di depan mata dan saat ini kita telah mengalaminya sendiri. Setiap hari kita dihadapkan pada sebuah kemungkinan-kemungkinan hidup yang serba penuh kerentanan dan tidak ada jaminan keberlanjutan. Kondisi Negara yang acak-acakan di mana demokrasi yang dijunjung tinggi telah ternodai oleh serangkaian tindakan-tindakan tidak patut oleh para elite, seperti pembuatan kebijakan yang tidak berorientasi pada rakyat, contohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Suara rakyat semakin dibungkam, partisipasi penuh yang menjadi kunci demokrasi tidak pernah dijalankan bahkan disumbat. Demokrasi kita parahnya hanya dimaknai kebebasan berpendapat yang tak sepenuhnya bebas, karena diancam oleh aneka pasal karet dalam hukum pidana. Bahkan suara rakyat disederhanakan hanya sebatas memilih kala pemilu tiba, tetapi partisipasi penuh dihilangkan. Inilah demokrasi prosedural yang dilakukan oleh elite, guna mengukuhkan status quo agar terus mencengkeram kekuasaan dan memperluas kekayaan.

Kondisi hidup yang semakin rentan, PHK terjadi di mana-mana, upah murah kembali marak, fleksibilitas kerja semakin dipertegas, sistem *outsourcing* sampai kemitraan palsu telah hadir, dan saat ini seolah-olah menjadi hal yang normal. Krisis sosial ekologis semakin menunjukkan kenyataan, di mana buruh dan segenap rakyat dihadapkan pada polusi udara, krisis air, bencana iklim sampai digusur atas nama pembangunan. Mereka pun tak mampu bersuara, sekali kencang menyuarakan hak mereka, kriminalisasi sampai kekerasan bahkan intimidasi menjadi hal yang sering kita jumpai. Bahkan menjadi pemandangan sehari-hari.

Tidak hanya itu, kesejahteraan rakyat semakin menurun, pangan semakin mahal diakibatkan menurunnya produksi di sektor pangan, karena degradasi ekologis dari turunnya kesuburan lahan, krisis air, anomali iklim sampai alih fungsi ruang, bahkan tidak hanya itu saja permainan harga oleh para mafia bahan pangan semakin mendorong petani dalam situasi pelik. Kala pangan mahal serta upah yang tak menentu, tentu lagi-lagi buruh yang harus merasakan dampaknya. Kemiskinan akan semakin langgeng, kesejahteraan akan selamanya menjadi jargon kosong dan bak kaset kusut yang terus menjadi gorengan elite politik.

Konflik agraria pun semakin tinggi, kriminalisasi dan kekerasan serta intimidasi semakin nyata dan sering terjadi. Banyak petani kecil tak berdaya menjadi korban dari kondisi tersebut. Bahkan rakyat yang menyuarakan hak atas lingkungan hidup juga mengalami hal serupa. Kriminalisasi adalah jawaban atas protes rakyat yang hidup dalam lingkungan hidup yang buruk. Mereka dianggap ancaman bagi para elite dan tidak dianggap sebagai warga negara.

Saat ini bahkan kondisi kehidupan semakin tidak menentu, bahkan turut berdampak pada kondisi perempuan dan anak, saat ini kekerasan perempuan di sektor buruh dan lainnya semakin meningkat. Dampaknya pun sampai pada anak buruh, mereka menjadi korban kekerasan sampai kurangnya kasih sayang dari orang tua akibat waktu kerja yang panjang, serta adanya beban kerja yang berlebihan. Sehingga hal ini penting juga menjadi perhatian bersama.

May Day 2024 ini menjadi pengingat bersama bahwa tanpa adanya gerakan kolektif bersama, maka tidak akan ada perubahan atas kehidupan. Perlu digarisbawahi bahwa perjuangan ini adalah perjuangan bersama, sebuah upaya untuk memperjuangkan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

